



RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA

**DINAS KETENAGAKERJAAN
KOTA TANGERANG**

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang Tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai jadwal yang ditentukan.

Rancangan Akhir Renja Disnaker Kota Tangerang Tahun 2026 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, RPJPD Kota Tangerang Tahun 2005-2025, RPD Kota Tangerang Tahun 2024-2026, Renstra Disnaker Kota Tangerang Tahun 2024-2026 dan Rancangan Akhir RKPD Kota Tangerang Tahun 2026.

Rancangan Akhir Renja Disnaker Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi tujuan dan sasaran Rencana Strategis Disnaker Tahun 2024-2026 serta program dan kegiatan Disnaker Tahun 2026. Selanjutnya program dan kegiatan merupakan kebutuhan kinerja yang akan dilaksanakan Disnaker berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan.

Semoga Rancangan Akhir Renja Tahun 2026 yang telah diselesaikan ini dapat dijadikan pedoman bagi pegawai Disnaker dalam memenuhi target dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, agar mampu memberikan kontribusi positif bagi kinerja Pemerintah Kota Tangerang.

Tangerang, Julil 2025
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN

UJANG HENDRA GUNAWAN, S.Sos, MM
NIP. 19720502 200212 1009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB 2. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	21
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD	34
2.4. Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025	39
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	45
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	45
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disnaker.....	47
3.3. Program dan Kegiatan	55
BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	67
4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	67
BAB 5. PENUTUP.....	88

DAFTAR TABEL

BAB 2

Tabel 2.1.	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat sampai dengan tahun 2024	10
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2019-2024.....	30
Tabel 2.3.	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Kota Tangerang	41

BAB 3

Tabel 3.1.	Tujuan dan Sasaran Dinas Ketenagakerjaan.....	48
Tabel 3.2.	Rumusan dan Rencana Program Kegiatan Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027	55

BAB 4

Tabel 4.1.	Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026	68
------------	--------------------------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

BAB 2

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang	22
----------------------------------------------------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Disnaker Kota Tangerang Tahun 2025 nantinya merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis Disnaker Tahun 2024-2026. Renja SKPD disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Renja secara teknis berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Akhir Renja Disnaker disusun dengan mengacu pada Rancangan Akhir RKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan.

Rancangan Akhir Renja Disnaker memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Disnaker disusun dengan tahapan sebagai berikut :

1. Penyiapan penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, meliputi pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, orientasi Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi;
2. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Akhir RKPD;
3. Pelaksanaan Forum SKPD, merupakan pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah antara pemangku kepentingan untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan;
4. Penetapan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rancangan Renja Disnaker Tahun 2026, dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renja, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2015 Nomor 6);
 18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2032;
 19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Tahun 2005-2025;
 20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 8);
 21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2019 Nomor 3);
 22. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 133 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.

23. Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan.
24. Surat Edaran Walikota Tangerang Nomor: 000.7.2.6/3774/II/2025 tentang Rancangan Akhir RPKD Tahun 2026.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Rancangan Akhir Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra Tahun 2024-2026 dan mengacu kepada Rancangan Akhir RPKD Tahun 2026. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Akhir Renja Disnaker dimaksudkan untuk memberi pedoman, arahan dan acuan bagi Disnaker dalam urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2026 sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Akhir Renja Disnaker adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2026;
2. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Renja Disnaker Kota Tangerang Tahun 2026 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :

BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah,

proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB 2. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PERANGKAT DAERAH Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat

Daerah berdasarkan indikator kinerja.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan.

BAB 3. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

BAB 4. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB 5. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan perkiraan pelaksanaan DPA-Perangkat Daerah tahun berjalan yang baru disahkan.

Telaahan hasil evaluasi mencakup:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan

kebutuhan program dan kegiatan pada rencana kerja untuk tahun yang direncanakan.

Review capaian prioritas dan target program Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program.
2. Evaluasi pencapaian prioritas program dan target kinerja program berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauhmana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
3. Rumuskan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja program Renstra Perangkat Daerah dan pencapaian visi dan misi kepala daerah.
4. Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan, misalnya program apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan daripelaksanaannya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2024 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Ketenagakerjaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d akhir Renstra (2026)	Realisasi Renstra 2019-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Renstra Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)		
2		URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR										
2	07	KETENAGAKERJAAN										
2	07	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja	100	100	100	100	100%	100	100%	
		2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	6	2	2	2	100%	2	100%	
		01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	1	1	1	100%	1	100%	
		02	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	90	-	30	30	100	30	100	
2	07	03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja terlatih yang bersertifikat kompetensi	85,71	98,89	75	99,28	132,27	82,14	90,00	109,57%

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d akhir Renstra (2026)	Realisasi Renstra 2019-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Renstra Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	
	2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	60	150	30	30	100%	30	40	133,33%
	01	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	1140	1163	480	659	137,29%	380	640	168,42%
	02	Sub Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	90	0	0	0	0	30	30	100%
	03	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	96	0	-	-	0	32	32	100%
	2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	12	-	1	1	100%	1	1	100%
	01	Sub Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	15	-	5	5	100%	5	5	100%
	2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	3	-	1	1	100%	1	1	100%

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d akhir Renstra (2026)	Realisasi Renstra 2019-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Renstra Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	
		Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	15	-	5	5	100%	5	5	100%
	2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	3	-	1	1	100%	1	1	100%
		Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	300	-	100	100	100%	100	100	100%
	205	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3	-	1	1	100%	1	1	100%
	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah	840		480	832	173,33%	480	640	133,33%
2	074	Program Penempatan Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yang ditempatkan	99,24%	98,89%	98,84%	100%	122,13%	99,2%	100%	100,81%
	201	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	6	10	2	2	100%	2	2	100%
	03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20250		6750	6750	100%	6750	6750	100%

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d akhir Renstra (2026)	Realisasi Renstra 2019-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Renstra Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	
	05	Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	2520	3.842	840	840	100%	840	840	100%
	203	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	36	12	12	12	100%	12	12	100%
	03	Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	15000	6978	5000	5125	102,5%	5000	5200	104,00%
	204	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	9		3	3	100%	3	3	100%
	03	Sub Kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	660	113	150	179	119,33%	220	220	100%
2	075	Program Hubungan Industrial	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	66,67	71,43	69,23	78,29	113,08%	68,00	69,23	101,8%

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d akhir Renstra (2026)	Realisasi Renstra 2019-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Renstra Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	
	201	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	4	4	4	100	4	4	100%
	01	Sub Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	390	120	130	228	175,38%	130	200	153,84%
	02	Sub Kegiatan Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	75	-	25	33	132,00%	25	25	100%
	03	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	27	9	9	9	100,00%	9	9	100%

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d akhir Renstra (2026)	Realisasi Renstra 2019-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Renstra Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	
	202	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	15	3	5	5	100,00%	5	5	100%
	01	Sub Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	285	-	95	183	192,63%	95	95	100%
	02	Sub Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	285	90	95	137	144,21%	95	95	100%
	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	36	-	12	17	141,67%	12	12	100%
	04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	36		12	12	100,00%	12	12	100%

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d akhir Renstra (2026)	Realisasi Renstra 2019-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Renstra Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
	05	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	180	-	60	60	100,00%	60	60	100%
1	02	URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN								
1	02	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat Ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tingkat Ketersediaan pelaporan dan keuangan perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d akhir Renstra (2026)	Realisasi Renstra 2019-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Renstra Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)
		Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Ketersediaan Barang Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tingkat Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d akhir Renstra (2026)	Realisasi Renstra 2019-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Renstra Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	
		Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	0701	2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	27	9	9	9	100%	9	9	100%
		01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	27	9	9	9	100%	9	9	100%
2	0701	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	36	12	12	12	100%	12	36	100%
		01 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120	38	38	38	100%	38	38	100%
2	0701	2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	42	14	14	14	100%	14	14	100%
		06 Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36	12	12	12	100%	12	12	100%
1	0201	2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	36	12	12	12	100%	12	12	100%

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d akhir Renstra (2026)	Realisasi Renstra 2019-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Renstra Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)			
	02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	120	0	0	0	40	40	33,33%			
1	02	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersedia	21	7	7	7	100%	7	21	100%
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	1	100%
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	1	100%
			03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	1	100%

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d akhir Renstra (2026)	Realisasi Renstra 2019-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Renstra Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)			
	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	1	100%		
	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	1	1	1	100%	1	1	100%		
	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	12	12	12	100%	12	12	100%		
	07	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	12	12	12	100%	12	12	100%		
1	02	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur daerah yang memadai	3	-	1	1	100%	1	1	100%

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d akhir Renstra (2026)	Realisasi Renstra 2019-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Renstra Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)			
	06	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	-	1	1	100%	1	1	33,33%		
1	02	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	9	3	62	62	100%	3	3	100%
			01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	12	12	12	100%	12	12	100%
			02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	12	100%	12	12	100%
			06	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	12	12	100%	12	12	100%
1	02	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	12	4	4	4	100%	4	4	100%

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

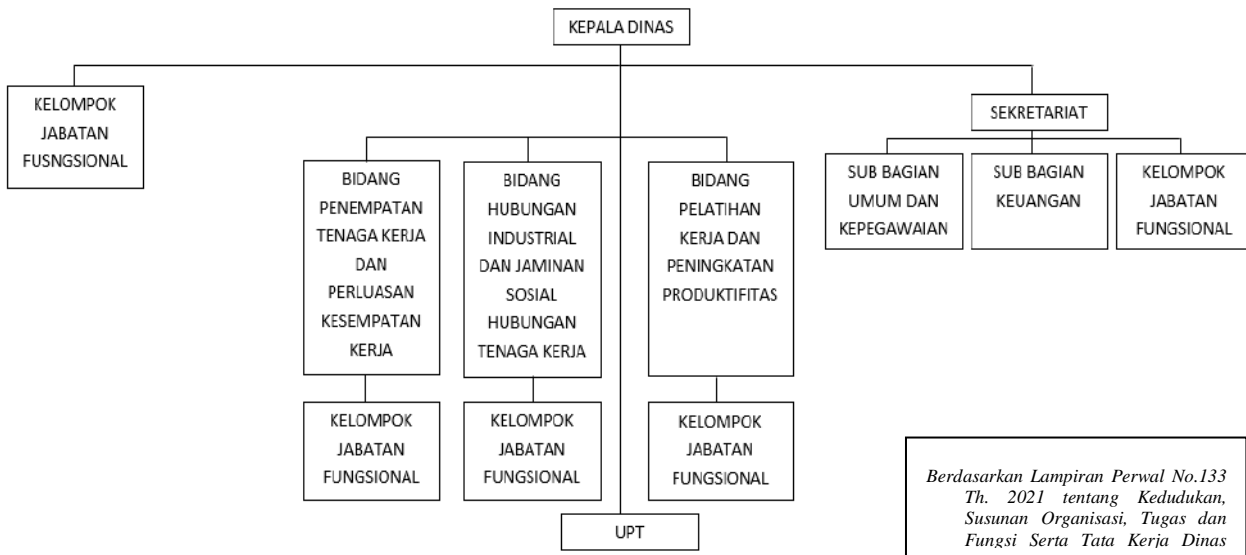
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) s/d akhir Renstra (2026)	Realisasi Renstra 2019-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan (Renja PD Th 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD tahun 2024	Realisasi Renja PD tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Renstra Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/9)	
	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19	19	19	19	100%	19	19	100%
	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9	9	9	9	100%	9	9	100%
	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	213	71	71	71	100%	71	71	100%
	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15	5	5	5	100%	5	5	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tangerang. Susunan organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang berdasarkan Pasal 2 Peraturan Walikota Tangerang Nomor 133 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja,
- d. Bidang Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
- e. Bidang Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas,
- f. UPT, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang

Selanjutnya berdasarkan Pasal 3, Dinas Ketenagakerjaan mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan pada Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan di bidang ketenagakerjaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan bidang ketenagakerjaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenagakerjaan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan bidang ketenagakerjaan;
- e. Pengelolaan UPT; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dari masing-masing satuan organisasi (unit kerja) pada Dinas Ketenagakerjaan sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan perencanaan. Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penatausahaan urusan umum;
- b. penatausahaan urusan kepegawaian;
- c. penatausahaan urusan keuangan;
- d. pengkoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
- e. pengkoordinasian dalam pembangunan dan pengembangan *e-government*, dan
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang-Bidang dan UPT-UPT di lingkungan Dinas.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Susunan organisasi sekretariat, terdiri dari :

- a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub-Bagian Keuangan; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan kepegawaian.

Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat/tata naskah Dinas;
- c. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan Dinas;
- d. melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- g. melakukan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Dinas;
- h. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
- i. melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah yang dalam penguasaan Perangkat Daerah;
- j. melakukan fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan e-government;
- k. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan.

Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah:

- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. melakukan pembinaan penatausahaan keuangan Dinas;
- c. melakukan penatausahaan anggaran Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melakukan pengelolaan kas Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. menyimpan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- g. melakukan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

B. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja;
- b. penyelenggaraan pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;
- c. penyelenggaraan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja;
- d. penyelenggaraan verifikasi penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- e. penyelenggaraan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- f. penyelenggaraan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- g. pengoordinasian pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon TKI;
- h. penyelenggaraan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;
- i. penyelenggaraan pembinaan keberadaan tenaga kerja asing di Daerah;
- j. pengoordinasian penyelenggaraan Tenaga Kerja Luar Negeri pra dan purna penempatan;
- k. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Susunan organisasi Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan peryaratan kerja, pengupahan, jaminan sosial tenaga kerja;
- b. penyelenggaraan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan, fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Tripartit;
- c. penyelenggaraan upaya-upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
- d. penyelenggaraan pengusulan rancangan penetapan Upah Minimum Kota dan sektoral ;
- e. penyelenggaraan pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama;
- f. penyelenggaraan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- g. penyelenggaraan pembinaan, evaluasi dan fasilitasi/mediasi terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan syarat-syarat kerja; dan
- h. melakukan pendaftaran alur proses, pendaftaran pemborongan pekerjaan, pendaftaran penyedia jasa pekerja/buruh
- i. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Susunan organisasi Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

D. Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas

Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dalam lingkup Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas. Bidang Pelatihan kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK);
- b. penyelenggaraan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta
- c. penyelenggaraan koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- d. penyelenggaraan koordinasi pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. penyelenggaraan koordinasi/pemberian tanda daftar Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Lembaga Pelatihan di perusahaan;
- f. penyelenggaraan koordinasi / pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- g. penyelenggaraan koordinasi pengukuran dan analisis produktivitas tingkat kota;
- h. penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri terhadap lembaga pelatihan kerja;
- i. penyelenggaraan koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
- j. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya

Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Susunan organisasi Bidang Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

E. Kelompok Jabatan Fungsional

Di lingkungan Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan yang pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tugas dan fungsi kelompok jabatan fungsional, sebagai berikut :

- 1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- 4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Jabatan fungsional dan Sub-Koordinator, sebagai berikut :

- 1) Pejabat fungsional yang menjadi Koordinator dan/atau Sub-koordinator merupakan jabatan fungsional hasil penyetaraan atau bukan hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- 2) Koordinator dan/atau Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- 3) Penugasan pejabat fungsional ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas Koordinator dan/atau Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota.

Selanjutnya Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan, terdapat penambahan nomenklatur pada pasal 1 sebagai berikut :

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional pada Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang.
12. Ketua Tim Kerja adalah Pejabat Fungsional atau pelaksana yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

Kemudian pada Pasal 16 diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketua Tim Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
2. Penugasan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Ketua Tim Kerja berpedoman pada peraturan perundang-undang.

Analisis kinerja Perangkat Daerah disajikan dalam Tabel 2.2 di bawah ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK- Satuan	Renstra Periode 2019-2023			Target Renstra Periode 2024-2026			Analisis
				Total Target 5 Tahun	Realisasi Target 5 Tahun	% Pencapaian	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja (TPTK)	-	%	%	-	-	-	82,00	83,00	
1.1	Prosentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	-	%	%	403,42	487,41	120,82	98,84	98,50	
1.1.1	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	Jenis	Jenis	-	-	-	2,00	2,00	
1.1.2	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	-	orang	orang	-	-	-	6750	6750	
1.2	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	-	orang	orang	-	-	-	5000	5000	
1.3	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	-	orang	Orang	-	-	-	170	220,00	
II	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja	-	%	%	100	100	100	100	100	
2.1	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	jenis	jenis	2	2	100	2	2	
2.1.1	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	-	dokumen	dokumen	1	1	100	1	1	
2.1.2	Jumlah perusahaan yang mengikuti Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/ Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	-	perusahaan	perusahaan	-	-	-	30	30	
III	Prosentase Tenaga Kerja Terlatih Yang Bersertifikat Kompetensi	-	%	%	233,99	288,56	123,32	75	82,14	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK-Satuan	Renstra Periode 2019-2023			Target Renstra Periode 2024-2026			Analisis
				Total Target 5 Tahun	Realisasi Target 5 Tahun	% Pencapaian	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3.1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	kegiatan	-	-	-	20	20	20	
3.1.1	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-	orang	1570	1609	102,48	380	380	380	
3.2	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	-	lembaga	-	-	-	30	30	30	
3.3	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	-	unit	-	-	-	32	32	32	
3.4	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	-	orang	-	-	-	1	1	1	
3.5	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	-	lembaga	-	-	-	5	5	5	
3.6	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	-	perizinan	-	-	-	5	5	5	
3.7	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	-	perusahaan	-	-	-	100	100	100	
3.8	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah	-	dokumen	-	-	-	280	280	280	
IV	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	-	%	-	-	-	20	20	20	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK-Satuan	Renstra Periode 2019-2023			Target Renstra Periode 2024-2026			Analisis
				Total Target 5 Tahun	Realisasi Target 5 Tahun	% Pencapaian	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.1	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	-	Perusahaan	370,28	416,08	112,37	69,23	68	66,67	
4.2	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	-	Perusahaan	-	-	-	130	130	130	
4.3	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	-	Laporan	-	-	-	25	25	25	
4.4	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	-	Perkara	-	-	-	9	9	9	
4.5	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	-	Perkara	-	-	-	95	95	95	
4.6	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	-	Asosiasi dan Serikat Pekerja	579	605	104,49	95	95	95	
4.7	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	-	lembaga	-	-	-	12	12	12	
4.8	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	-	Orang	1	1	100	1	1	1	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra SKPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan uraian di atas teridentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Disnaker dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. *Kualitas dan kompetensi tenaga kerja*; Daya saing tenaga kerja dipengaruhi oleh kualitas dan kompetensi dari tenaga kerja tersebut. Meskipun lowongan kerja yang tersedia cukup besar, namun apabila faktor kualitas SDM tenaga kerja di Kota Tangerang rendah, maka akan dapat mempengaruhi besar kecilnya kesempatan kerja yang berdampak pada pengangguran di Kota Tangerang. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja di Kota Tangerang mutlak diperlukan agar tenaga kerja Kota Tangerang dapat bersaing dengan tenaga kerja dari wilayah lain, terutama pada era pasar bebas saat ini;
2. *Kemandirian tenaga kerja*; Ketergantungan tenaga kerja terhadap lowongan pekerjaan, merupakan salah satu bukti masih belum mandirinya tenaga kerja di Kota Tangerang. Akibatnya lowongan kerja yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang berdampak pada peningkatan angka pengangguran. Kemandirian yang dimaksudkan adalah upaya tenaga kerja untuk dapat menciptakan lapangan kerja sendiri, tanpa harus bergantung dari lowongan kerja yang tersedia. Melalui adanya kemandirian, diharapkan akan tercipta lapangan pekerjaan baru yang tidak hanya membawa manfaat bagi tenaga kerja tersebut, namun juga meningkatkan akses dan kesempatan kerja serta pertumbuhan

perekonomian Kota Tangerang. Dalam upaya perwujudan kemandirian, tenaga kerja di Kota Tangerang dituntut untuk memiliki kemampuan (*skill*) yang cukup dan kreatif.

3. *Akses dan kesempatan kerja.* Perluasan akses dan kesempatan kerja dibutuhkan untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Tangerang. Peningkatan akses tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang dalam menanggulangi angka pengangguran. Perlu adanya inovasi baru dalam pelayanan kartu pencari kerja(AK-I) dalam bentuk *online*
4. *Perlindungan hukum bagi tenaga kerja;* Lemahnya peraturan hukum yang mengatur mengenai norma-norma ketenagakerjaan merupakan ancaman dalam upaya menjaga keharmonisan iklim pekerjaan. Lemahnya peraturan tersebut merupakan bukti belum terlindunginya hak-hak tenaga kerja di Kota Tangerang. Kondisi tersebut dapat menciptakan konflik yang akan merugikan tenaga kerja.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka dirumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yaitu:

A. Peningkatan Kesempatan Kerja

Peningkatan kesempatan kerja akan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Meningkatkan Kerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri dalam menyerap lulusan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan.
- b. Menyelenggarakan kegiatan bursa kerja (job fair) baik secara virtual maupun secara langsung dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada perusahaan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
- c. Mendorong perusahaan dalam kegiatan pemagangan, sehingga mampu menyerap tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu yang akan berdampak pada pengurangan jumlah pengangguran.
- d. Mendorong perusahaan agar melakukan pendaftaran Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sehingga didapatkan data kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan.

- e. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja Luar Negeri (LPKLN) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) baik SMK maupun Perguruan Tinggi dalam rangka menyampaikan informasi peluang kerja di luar negeri dan mempersiapkan tenaga kerja dengan pelatihan Bahasa asing.

B. Peningkatan Kompetensi Dan Daya Saing Tenaga Kerja

Peningkatan kompetensi adalah kombinasi dari keterampilan, perilaku, sikap, dan pengetahuan yang ditunjukkan oleh seorang tenaga kerja dan calon tenaga kerja dengan baik. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang tinggi adalah salah satu sumber daya terpenting yang dapat dimiliki setiap perusahaan karena, mereka dapat berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan daya unggul perusahaan di dalam industrinya. Sedangkan calon tenaga kerja dengan kompetensi yang baik akan mendapat peluang kerja yang baik. Peningkatan Kompetensi Dan Daya Saing Tenaga Kerja akan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Peningkatan akreditasi program pelatihan pada Balai Latihan Kerja (BLK) dan penyesuaian program pelatihan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry.
- b. Peningkatan pembinaan dan Kerjasama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta dan LPK Perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja.
- c. Pelatihan berbasis kewirausahaan dalam rangka membentuk dan meningkatkan jumlah wirausaha baru yang berdampak pada penurunan angka pengangguran.
- d. Pembinaan Bursa Kerja Khusus baik di SKM maupun di Perguruan Tinggi melalui program Pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industry.

C. Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan terhadap tenaga dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan

kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Berikut prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja di antaranya :

- a. Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan;
- b. Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan;
- c. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha;
- d. Setiap mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat kemampuannya melalui pelatihan kerja;
- e. Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri;
- g. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama;
- h. Setiap pekerja/buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- i. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja;
- j. Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.

Pasal 88 ayat (1) UU No. 13/2003 menyatakan dengan tegas dan jelas, "Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: a. keselamatan dan kesehatan kerja; b. moral dan kesusilaan; dan c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama". Hak-hak tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut sebagai berikut :

- a. Hak – Hak Karyawan
- b. Hak Memperoleh Upah.
- c. Hak Mendapatkan Kesempatan & Perlakuan yang Sama.
- d. Hak Mendapatkan Pelatihan Kerja.
- e. Hak Penempatan Tenaga Kerja.
- f. Hak Memiliki Waktu Kerja yang Manusiawi.
- g. Hak Mendapatkan Kesehatan & Keselamatan Kerja.
- h. Hak Mendapatkan Kesejahteraan.
- i. Hak Ikut Serta Dalam Serikat Pekerja/Buruh

Pada periode pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024-2026, perlindungan hak pekerja akan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Usulan penetapan upah minimum kota (UMK) sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku serta penerapan perlindungan tenaga kerja melalui monitoring kepatuhan pelaksanaan pemberian UMK dan jaminan kesehatan serta jaminan social ketenagakerjaan.
- b. Pemberian perlindungan tenaga kerja di luar negeri bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berasal dari Kota Tangerang melalui kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (BP2MI).

D. Hubungan Industrial

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hubungan industrial adalah hubungan pihak yang berkepentingan atas proses produksi baik barang maupun jasa di perusahaan. Hubungan industrial mengambil istilah dari "*labour relation*" atau hubungan perburuhan.

Pada periode pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2024-2026, hubungan industrial akan dilaksanakan melalui sarana hubungan industrial yang terdiri dari :

- a. Pembinaan kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

- b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Pengusaha;
- c. Meningkatkan pembinaan kepada Lembaga Kerjasama Bipartit;
- d. Kerjasama dengan Lembaga Kerjasama Tripartit;
- e. Sosialisasi dan pengesahan Peraturan Perusahaan;
- f. Sosialisasi dan pengesahan Perjanjian Kerja Bersama;
- g. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan;
- h. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026

Telaahan terhadap rancangan Akhir RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan Akhir RKPD.

Review terhadap rancangan Akhir RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam RKPD;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Disajikan dalam bentuk matrik tabel, dengan menempatkan program/kegiatan yang sama pada garis yang sama untuk memudahkan analisis;
4. Melakukan pengecekan apakah program/kegiatan yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas Perangkat Daerah sudah termuat dalam RKPD;
5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan Akhir RKPD dengan hasil analisis

kebutuhan;

6. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai, dilakukan langkah berikut:
 - a. Pengecekan apakah indikator kinerjanya sesuai, jika tidak sesuai, ditentukan indikator yang akan dipilih;
 - b. Meneliti besaran tolok ukur atau target capaian program/kegiatan, bila terdapat perbedaan, maka dikaji kembali besaran tersebut dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif, target capaian Renstra Perangkat Daerah, serta ketersediaan sumber dana lainnya; dan
 - c. Memberi catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah.
7. Untuk jenis program dan kegiatan yang tidak sesuai (berbeda), dilakukan langkah berikut:
 - a. Untuk program dan kegiatan yang hanya terdapat di dalam RKPD, maupun yang hanya terdapat dalam identifikasi kebutuhan hasil analisis, dilakukan pengecekan apakah masih layak untuk direncanakan, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata, sasaran target Renstra Perangkat Daerah, kebijakan nasional, pencapaian visi-misi kepala daerah, dan ketersediaan pendanaan;
 - b. Meneliti kembali kemudian tentukan indikator yang akan dipilih;
 - c. Meneliti kembali kemudian tentukan besaran tolok ukur atau target capaian program dan kegiatan, dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu indikatif berdasarkan arahan rancangan Akhir RKPD, target capaian Renstra Perangkat Daerah, serta ketersediaan sumber dana lainnya;
 - d. Memberi catatan penting sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan program dan kegiatan yang akan direncanakan dalam Renja Perangkat Daerah.
8. Merumuskan kebutuhan program dan kegiatan hasil review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan;

dan

9. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Akhir RKPDP Tahun 2026 Kota Tangerang

SKPD : Dinas Ketenagakerjaan

No	Rancangan Akhir RKPDP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
					26.215.049.078,00					26.215.049.078,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Tangerang	Tingkat Ketersediaa n Dokumen Perencanaa n, Penganggar an dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	18.979.670.896	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Tangerang	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	18.979.670.896	
			Tingkat Ketersediaa n Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%		

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		
			Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%		
			Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Barang/Jasa Pendukung Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%		
			Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100%				Tingkat Ketersediaan Jasa Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	100%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 Dokumen	500.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	16 Dokumen	500.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen	500.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen	500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	13.505.225.272,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	13.505.225.272,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tangerang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	13.505.225.272,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Tangerang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 Orang/Bulan	13.505.225.272,00	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	14 Laporan	604.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	14 Laporan	604.000,00	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penatausah aan Barang Milik Daerah	12 Laporan	604.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	604.000,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Jumlah Dokumen/L aporan Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah yang disediakan	12 Dokumen	17.045.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Jumlah Dokumen/Lapor an Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disediakan	12 Dokumen	17.045.000,00	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tangerang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	45 paket	17.045.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Tangerang	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	40 paket	17.045.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	7 Jenis	1.857.524.750	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Tangerang	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	7 Jenis	1.857.524.750	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pene rangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	13.512.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket	13.512.000,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang disediakan	1 Paket	195.385.800,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	195.385.800,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tangerang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	40.853.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Tangerang	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	40.853.600	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1.094.770.300,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1.094.770.300,00	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tangerang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	33.806.500,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Tangerang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	33.806.500,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Tangerang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	12 Dokumen	1.504.800,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Kota Tangerang	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	12 Dokumen	1.504.800,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyeleng- garan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	777.455.000,00	Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	777.455.000,00	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tangerang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah yang memadai	1 Kegiatan	29.382.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Tangerang	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Daerah yang memadai	1 Kegiatan	29.382.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	29.382.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	1 Unit	29.382.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tangerang	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	3 Jenis	2.354.956.373	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tangerang	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	3 Jenis	2.354.956.373	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.500.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.500.000,00	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	870.922.080,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	870.922.080,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	2.674.170.077,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Tangerang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	2.674.170.077,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tangerang	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	714.285.850	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Tangerang	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Jenis	714.285.850	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tangerang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara yang dibayarkan pajaknya	19 Unit	1.019.574.100,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Tangerang	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara yang dibayarkan pajaknya	19 Unit	1.019.574.100,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tangerang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	176.487.100,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Tangerang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit	176.487.100,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lain-lain	Kota Tangerang	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	71 Unit	45.893.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lain-lain	Kota Tangerang	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	71 Unit	45.893.000,00	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	513.488.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Tangerang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Unit	513.488.000,00	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Tangerang	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja	100%	39.176.600,00	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Kota Tangerang	Tingkat Ketersediaan Perencanaan Tenaga Kerja	100%	39.176.600,00	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Tangerang	Tersedianya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2 Jenis	39.176.600,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Kota Tangerang	Tersedianya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2 Jenis	39.176.600,00	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Tangerang	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	10.822.600,00	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Kota Tangerang	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	10.822.600,00	
	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Tangerang	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	30 Orang	28.354.000	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Kota Tangerang	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu Menyusun RTK Mikro	30 Orang	28.354.000	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Tangerang	Prosentase Tenaga Kerja Terlatih yang bersertifikat Kompetensi	85,71%	3.465.667.200,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Tangerang	Prosentase Tenaga Kerja Terlatih yang bersertifikat Kompetensi	85,71%	3.465.667.200,00	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Tangerang	Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	20 Kegiatan	2.958.669.700,00	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kota Tangerang	Terlaksananya Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	20 Kegiatan	2.958.669.700,00	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Cluste Kompetensi	Kota Tangerang	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	380 Orang	2.530.911.100,00	Proses Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Cluste Kompetensi	Kota Tangerang	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun N	380 Orang	2.530.911.100,00	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Tangerang	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada tahun N	30 Lembaga	28.111.200,00	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Tangerang	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada tahun N	30 Lembaga	28.111.200,00	
	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	32 Unit	399.647.400,00	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	32 Unit	399.647.400,00	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Tangerang	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	4 Kegiatan	116.961.600,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Tangerang	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	4 Kegiatan	116.961.600,00	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Tangerang	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	5 Lembaga	116.961.600,00	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Kota Tangerang	Jumlah Lembaga Pelatihan Swasta yang dibina	5 Lembaga	116.961.600,00	
	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	1 Kegiatan	127.710.500,00	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	1 Kegiatan	127.710.500,00	
	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Tangerang	Jumlah Sumber Daya Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	127.710.500,00	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Kota Tangerang	Jumlah Sumber Daya Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	5 Perizinan	127.710.500,00	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Tangerang	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1 Kegiatan	95.323.000,00	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kota Tangerang	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1 Kegiatan	95.323.000,00	
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	100 Perusahaan	95.323.000,00	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	100 Perusahaan	95.323.000,00	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	167.002.400,00	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1 Kegiatan	167.002.400,00	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Tangerang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	280 Dokumen	167.002.400,00	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Kota Tangerang	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	280 Dokumen	167.002.400,00	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Tangerang	Prosentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	99,24%	2.427.155.970	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Tangerang	Prosentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	99,24%	1.199.656.600,00	
	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	2 Kegiatan	1.418.248.764	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2 Kegiatan	1.025.481.000,00	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Kota Tangerang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	6750 orang	372.267.614	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Kota Tangerang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	6750 orang		
	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Tangerang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	840 orang	1.045.981.150	Perluasan Kesempatan Kerja	Kota Tangerang	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	840 orang	1.025.481.000,00	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	12 Kegiatan	798.371.406	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	12 Kegiatan		

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Job Fair/ Bursa Kerja.	Kota Tangerang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	5000 orang	798.371.406	Job Fair/ Bursa Kerja.	Kota Tangerang	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	5000 orang		
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/ Kota	12 kegiatan	174.175.600,00	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	12 kegiatan	174.175.600,00	
	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indomesia (PMI)	Kota Tangerang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	270 orang	174.175.600,00	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indomesia (PMI)	Kota Tangerang	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	270 orang	174.175.600,00	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Tangerang	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	66,67%	1.230.334.600,00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Tangerang	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	66,67%	1.230.334.600,00	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	4 kegiatan	413.304.000,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4 kegiatan	413.304.000,00	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	130 perusahaan	126.784.400,00	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	130 perusahaan	126.784.400,00	
	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 perusahaan	8.375.600,00	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Kota Tangerang	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	25 perusahaan	8.375.600,00	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Tangerang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	9 laporan	278.144.000,00	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Kota Tangerang	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	9 laporan	278.144.000,00	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	5 kegiatan	817.030.600,00	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	5 kegiatan	817.030.600,00	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	95 perkara	418.509.800,00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	95 perkara	418.509.800,00	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	95 perkara	85.254.000,00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	95 perkara	85.254.000,00	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Tangerang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20.026.800,00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Kota Tangerang	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	20.026.800,00	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

No	Rancangan Akhir RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	192.000.000,00	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Kota Tangerang	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 lembaga	192.000.000,00	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60 orang	101.240.000,00	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kota Tangerang	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	60 orang	101.240.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Usulan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musrenbang (forum musyawarah perencanaan tahunan) baik tingkat kecamatan maupun tingkat kota yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Disnaker telah diakomodir dalam program dan kegiatan Disnaker yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kesempatan Kerja	Kp.Gembor Rw.05, Kota Tangerang	Bagi muda mudi yang tidak bekerja karena sulit	-	Usulan akan dilaksanakan pada kegiatan perluasan kesempatan kerja melalui Mobile Training Unit (MTU) SiPraja
2	Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kesempatan Kerja	Lingkungan RW 17, Kota Tangerang	Masih adanya para pencari kerja yang belum mempunyai keterampilan dan perlu adanya pelatihan/keterampilan demi pengembangan diri dan kemandirian untuk usaha	-	
3	Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kesempatan Kerja	Larangan Indah, Kota Tangerang	Perlunya pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja	-	
4	Penempatan Tenaga Kerja Perluasan Kesempatan Kerja	Larangan Indah, Kota Tangerang	Perlunya pelatihan kewirausahaan bagi pencari kerja membuat kue	-	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, dalam upaya untuk mewujudkannya diperlukan dasar-dasar transformasi yang kuat. Sebagai strategi dalam pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi.

Pada tahun 2026 pemerintah mempunyai tujuh agenda pembangunan sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Isu Strategis nasional yang akan ditangani pada tahun 2025 adalah:

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Hal Kesehatan dan Pendidikan
3. Penanggulangan Pengangguran Yang Disertai Decent Job
4. Mendorong Pemulihan Dunia Usaha
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan Dalam Rangka

Mendorong Produktivitas

6. Ekonomi Hijau

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah: "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" dengan 7 Prioritas Nasional. Tujuh PN tahun 2025 yang merupakan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2025, meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Dalam lima tahun mendatang, sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas adalah sebagai berikut: 1). Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan 2). Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Dalam lima tahun mendatang (2020-2024), sasaran pembangunan kewilayahan yang akan dicapai yaitu "Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera",
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing Sasaran dari prioritas Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, meliputi:
 - a. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan
 - b. Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
 - c. Terpenuhinya layanan dasar
 - d. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda
 - e. Terwujudnya pengentasan kemiskinan
 - f. Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing

Pembangunan Provinsi Banten tahun 2026 diarahkan pada Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Berintegritas Dan Integrasi

Ekonomi Domestik Dan Global. Dalam melaksanakan fokus pembangunan dan target pembangunan tahun 2026 sebagaimana diuraikan di atas, ditetapkan Rencana Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dengan Visi Banten Maju, Adil Merata Tidak Korupsi yang dijabarkan melalui Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila Dan Demokratis Berlandaskan Iman Dan Taqwa Melalui Reformasi Birokrasi Yang Berintegritas, Adaptif, Dan Tangguh.
2. Mendorong Kemajuan Ekonomi Secara Inklusif Melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, Dan Potensial.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, Dan Tidak Diskriminatif.
4. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Wilayah Yang Didukung Infrastruktur Berkualitas.
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Secara Holistik Dan Resiliensi Terhadap Bencana.

Berpedoman pada Visi dan Misi Provinsi Banten Tahun 2025-2029 sehingga penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah Kota Tangerang Tahun 2026, Visi dan Misi Kota Tangerang Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

Visi : Kota Tangerang Yang Kolaboratif, Maju, Berkelanjutan dan Berakhlakul Karimah

Misi :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul, Berbudaya dan Berakhlakul Karimah.
2. Meningkatkan Perekonomian Kota Yang Inovatif, Maju dan Harmonis.
3. Meningkatkan Infrastruktur KotaTang Lengkap, Terintegrasi, Mantap dan Inklusif.
4. Meningkatkan Lingkungan Hidup Yang Berkualitas.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif, Inovatif dan Berintegritas.

Tema Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2026 yaitu Implementasi

Pembangunan Kolaboratif Yang Inklusif Sebagai Perwujudan Banten Yang Sejahtera, Mandiri dan Berdaya Saing.

Adapun Tema Pembangunan Kota Tangerang Tahun 2026 yaitu Kota Tangerang yang Kolaboratif, Maju, Berkelanjutan, dan Berakhlakul Karimah.

Berdasarkan tema diatas, ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Tangerang tahun 2026 diarahkan pada :

1. Pemantapan Pondasi Daya Saing Sumberdaya Manusia;
2. Pemantapan Pondasi dan Daya Saing Perekonomian Daerah Berkeadilan dan Berkelanjutan;
3. Pemantapan Pondasi dan Daya Saing Regulasi dan Tata Kelola Berintegritas;
4. Pemantapan Pondasi dan Daya Saing Keamanan Daerah, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
5. Pemantapan Pondasi dan Daya Saing Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; serta
6. Mewujudkan Infrastruktur Kota Berdaya Saing, Modern, Inklusif dan Berkelanjutan.

Disnaker sebagai Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk mewujudkan akuntabilitas kinerjanya, dimana akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki makna perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, berdasarkan kebijakan yang telah disepakati maka program perlu ditetapkan dalam upaya pencapaian misi yang telah ditetapkan, program Renja Perangkat Daerah identik dengan program pada Renstra Perangkat Daerah.

Dengan tetap memperhatikan kebijakan, program adalah suatu upaya cara bertindak dalam upaya pencapaian misi, selama kurun waktu tertentu secara operasional (tahunan) dilaksanakan melalui kegiatan program. Tujuan program merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan program, setelah program dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Tujuan program akan tercapai apabila sasaran program tercapai artinya bahwa tujuan program akibat dari

sasaran program yang merupakan suatu pernyataan yang ingin dicapai pada tingkat program untuk kepentingan sekelompok masyarakat dan atau wilayah dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Disnaker dan memiliki keterkaitan dengan visi Disnaker yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun *tangible*, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai di masa mendatang.

Tujuan :

1. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Sasaran :

1. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Berusaha

3.3 Program Dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnaker sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Selain itu juga program berarti kumpulan kegiatan yang sistemis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat tertentu untuk mencapai

sasaran tertentu.

Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan oleh Disnaker pada tahun 2026 sebanyak 5 (lima) program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Kerja;
4. Program Pelatihan Kerja dan Peningkatan Produktivitas;
5. Program Hubungan Industrial.

Kegiatan adalah perwujudan dari program Disnaker sebagai bagian dari pencapaian program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku (fleksibel).

Berdasarkan program-program yang telah ditetapkan Disnaker, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan Disnaker pada tahun 2026, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, ada 8 (delapan) kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
 - a. Perencanaan, Penanggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Pemerintah Daerah;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah;
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja. Ada 1 (satu) kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu :
 - a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja
3. Program Penempatan Tenaga Kerja, ada 3 (tiga) kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;
 - c. Pelindungan PMI (Pra Dan Purna Penempatan) Di Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, ada 5 (lima) kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi;
 - b. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - c. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja;
 - d. Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil;
 - e. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Program Hubungan Industrial, ada 2 (dua) kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pengesahan Peraturan Perusahaan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Untuk Perusahaan Yang Hanya Beroperasi Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Pencegahan Dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja Dan Penutupan Perusahaan Di Daerah Kabupaten/Kota

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan Indikator	Target Indikator	Kebutuhan Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Catatan Penting
									APBD 2025	APBD 2026	Prakiraan Maju 2027		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2. Meningkatnya ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan keuangan Perangkat Daerah							
						2.1. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan keuangan yang disusun tepat waktu							
2	0	01	2.0		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	16	63.563.000	500.000,00	550.000,00	APBD	
2	0	01	2.0	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	9	63.563.000	500.000,00	550.000,00	APBD	
2	0	01	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Tahun	1	12,726,112,742	14.019.737.323	15,421,711,055	APBD	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan Indikator	Target Indikator	Kebutuhan Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Catatan Penting
									APBD 2025	APBD 2026	Prakiraan Maju 2027		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	01	2.0	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	45	13.270.476.402	14.019.737.323	15,421,711,055	APBD	
2	0	01	2.0		Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Dokumen	12	500.000	604.000,00	550.000	APBD	
2	0	01	2.0	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	500.000	604.000,00	550.000	APBD	
2	0	01	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tersedia	Paket	1	51.120.000	17.045.000,00	13.200.000	APBD	
2	0	01	2.0	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Paket	45	51.120.000	17.045.000,00	13.200.000	APBD	
2	0	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya target dan peningkatan kinerja melalui layanan administrasi umum perangkat daerah	Pesen	100	2.157.094.300	1.857.524.750	2.043.277.225	APBD	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan Indikator	Target Indikator	Kebutuhan Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Catatan Penting
									APBD 2025	APBD 2026	Prakiraan Maju 2027		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket	1	13.171.700	13.523.000	14.875.300	APBD	
2	0	01	206	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Paket	1	188.075.700	148.970.100	163.867.110	APBD	
2	0	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	Paket	1	42.550.400	40.853.600	44.938.960	APBD	
2	0	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang tersedia	Paket	1	1.104.788.700	943.984.000	1.038.382.400	APBD	
2	0	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan cetakan dan penggandaan	Paket	1	29.548.00	33.175.000	36.492.500	APBD	
2	0	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Dokumen	12	1.504.800	1.821.600	2.003.760	APBD	
2	0	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kerjasama dengan media massa (lokal, nasional) dalam publikasi	Laporan	12	777.455.000	675.197.450	742.717.195	APBD	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan Indikator	Target Indikator	Kebutuhan Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Catatan Penting
									APBD 2025	APBD 2026	Prakiraan Maju 2027		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						advertorial informasi pembangunan perangkat daerah yang diadakan							
2	0	01	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Tersedianya sarana dan prasarana aparatur daerah yang memadai	Kegiatan	1	97.392.000	29.382.000,00	22.183.260	APBD	
2	0	01	2.0	06	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	Unit	10	97.392.000	29.382.000,00	22.183.260	APBD	
2	0	01	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia	Jenis	3	3.756.120.136	2.354.956.373	3.550.592.157,00	APBD	
2	0	01	20	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	6.600.000	5.493.400.00	5.500.000,00	APBD	
2	0	01	20	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	870.922.080	769.000.000	870.922.080,00	APBD	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan Indikator	Target Indikator	Kebutuhan Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Catatan Penting
									APBD 2025	APBD 2026	Prakiraan Maju 2027		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	2.878.598.056	2.674.170.077,00	2.674.170.077,00	APBD	
2	0	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah yang tersedia	4	Jenis	1.221.852.100	1.019.574.100,00	785.714.435	APBD	
2	0	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	19	234.706.000	283.706.000,00	291.286.600	APBD	
2	0	01	208	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	10	269.487.100	176.487.100,00	263.655.810	APBD	
2	0	01	208	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	71	45.893.000	45.893.000,00	56.130.250	APBD	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan Indikator	Target Indikator	Kebutuhan Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Catatan Penting
									APBD 2025	APBD 2026	Prakiraan Maju 2027		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	01	208	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	5	671.766.000	513.488.000,00	174.641.775	APBD	
2	0	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase Perencanaan Tenaga Kerja	Persen	100	126.155.600	163.408.125	179.748.937	APBD	
2	0	02	201		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK)	dokumen	2	126.155.600	39.176.600,00	179.748.937	APBD	
2	0	02	201	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	dokumen	1	97.905.600	10.822.600,00	54.890.000	APBD	
2	0	02	201	02	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang	30	28.250.000	28.354.000	124.858.937	APBD	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan Indikator	Target Indikator	Kebutuhan Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Catatan Penting
									APBD 2025	APBD 2026	Prakiraan Maju 2027		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	0			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja Terlatih Yang Bersertifikat Kompetensi	Persen	99,30	4.217.861.700	3.465.667.200,00	3.812.926.655	APBD	
2	0	0	2.0		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Kegiatan	20	3.710.601.100	2.958.669.700,00	3.254.939.775	APBD	
2	0	0	2.0	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	750	3.047.580.100	2.530.911.100,00	2.784.002.275	APBD	
2	0	0	2.0	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan /Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga	30	31.581.000	28.111.200,00	30.937.500	APBD	
2	0	0	2.0	03	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	32	631.440.000	399.647.400,00	440.000.000	APBD	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan Indikator	Target Indikator	Kebutuhan Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Catatan Penting
									APBD 2025	APBD 2026	Prakiraan Maju 2027		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	0	2.0		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pem binaan LPK Swasta	Kegiatan	4	133.934.100	116.961.600,00	289.489.640	APBD	
2	0	0	202	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga	5	133.934.100	116.961.600,00	289.489.640	APBD	
2	0	0	2.0		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Kegiatan	1	172.484.900	127.710.500,00	14.659.810	APBD	
2	0	0	203	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	perizinan	5	172.484.900	127.710.500,00	14.659.810	APBD	
2	0	0	20		Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Kegiatan	1	47.075.800	95.323.000,00	32.164.990	APBD	
2	0	0	20	01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	100	47.075.800	95.323.000,00	32.164.990	APBD	
2	0	0	20		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	1	153.765.800	167.002.400,00	221.672.440	APBD	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan Indikator	Target Indikator	Kebutuhan Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Catatan Penting
									APBD 2025	APBD 2026	Prakiraan Maju 2027		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	0	20	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja diTingkat Daerah	Dokumen	280	153.765.800	167.002.400,00	221.672.440	APBD	
2	0	0			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Prosentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	Persen	88,00	2.250.209.500	1.199.656.600,00	2.669.871.567	APBD	
2	0	0	2.0		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jenis	2	1.230.271.100	1.025.481.000,00	1.560.073.640	APBD	
2	0	0	2.0	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapat kan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	6750	272.841.900		409.494.375.4	APBD	
2	0	0	2.0	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	840	957.429.200	1.025.481.000	1.150.579.265	APBD	
2	0	0	2.0		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Terlaksananya Pengelolaan Informa si Pasar Kerja	Kegiatan	12	845.528.800		878.208.546.6	APBD	
2	0	0	2.0	03	Job Fair/ Bursa Kerja.	Jumlah PencariKerja yang Mendapatkan	Orang	5000	845.528.800		878.208.546.6	APBD	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan Indikator	Target Indikator	Kebutuhan Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Catatan Penting
									APBD 2025	APBD 2026	Prakiraan Maju 2027		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja							
2	0	0	2.0		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan	3	174.409.600	174.175.600,00	231.589.380	APBD	
2	0	0	2.0	01	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indomesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	270	174.409.600	174.175.600,00	231.589.380	APBD	
2	0	0			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan	Persen	69,23	1.261.966.800	1.230.334.600,00	1.296.368.841	APBD	
2	0	0	2.0		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	Kegiatan	4	424.510.000	413.304.000,00	219.509.400	APBD	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan Indikator	Target Indikator	Kebutuhan Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Catatan Penting
									APBD 2025	APBD 2026	Prakiraan Maju 2027		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Kabupaten/Kota							
2	0	0	2.0	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan	130	126.784.400	126.784.400,00	122.984.400	APBD	
2	0	0	2.0	02	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan	25	8.375.600	8.375.600,00	47.520.000	APBD	
2	0	0	2.0	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	9	289.350.000	278.144.000,00	49.005.000	APBD	
2	0	0	2.0		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan	Pelaksanaan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,	kegiatan	5	837.456.800,0	817.030.600,00	1.076.859.441	APBD	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan Indikator	Target Indikator	Kebutuhan Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Catatan Penting
									APBD 2025	APBD 2026	Prakiraan Maju 2027		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota							
2	0	0	2.0	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara	95	438.936.000	418.509.800,00	429.813.040.8	APBD	
2	0	0	2.0	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampa k pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara	95	85.254.000	85.254.000,00	25.102.000	APBD	
2	0	0	2.0	03	Penyelenggaraan Ve rifikasi dan Rekapitu lasi Keanggotaan pa da Organisasi Pengu saha, Federasi dan	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja	12	20.026.800	20.026.800,00	46.081.200	APBD	

Rancangan Akhir Rencana Kerja
Dinas Ketenagakerjaan Tahun 2026

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan Indikator	Target Indikator	Kebutuhan Anggaran (Rp)			Sumber Dana	Catatan Penting
									APBD 2025	APBD 2026	Prakiraan Maju 2027		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi								
2	0	0	2.0	04	Pelaksanaan Operasi nal Lembaga Kerja sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	192.000.000	192.000.000,00	477.985.200	APBD	
2	0	0	2.0	05	PengembanganPelak sanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang	60	101.240.000	101.240.000,00	97.878.000	APBD	

BAB IV

RENCANA KERJA

DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam menjalankan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah. Penyusunan Renja berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Renja bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Dinas Ketenagakerjaan merupakan bagian yang utuh dari RPJMD Kota Tangerang dan Renstra Dinas Ketenagakerjaan. Dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Renja.

Program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Ketenagakerjaan pada tahun 2025 diperlihatkan dalam Tabel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1
**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
 DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA TANGERANG
 TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUM BER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASI ONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		DINAS KETENAGAKERJAAN						26.215.049.078,00								20.486.697.109,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.215.049.078,00								20.486.697.109,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						26.215.049.078,00								20.486.697.109,00	
1,	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-			-	18.979.670.896,00						-		13.320.190.001,00	
	2.07.01.2. 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	500.000,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-		500.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUM BER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2. 01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				9 Dokumen	500.000,00	Kota Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.019.737.323,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	8.355.416.428,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2. 02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				40 Orang /bulan	14.019.737.323,00	Kota Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD) DANA ALOK ASI UMU M (DAU)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		8.355.416.428,00	DINAS KETENAGA KERJAAN

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	500.000,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	500.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				12 Laporan	500.000,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		500.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	12.000.000,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	12.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				40 Paket	12.000.000,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah	-		12.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									a			berkeadilan dan berkelanjutan				
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	1.857.524.750,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.857.524.750,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	13.523.000,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		13.523.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	148.970.100,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		148.970.100,00	DINAS KETENAGA KERJAAN

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUM BER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2. 06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				1 Paket	40.853.600,00	Kota Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pening katan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		40.853.600,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2. 06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	943.984.000,00	Kota Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pening katan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		943.984.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2. 06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	33.175.000,00	Kota Tangera ng, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pening katan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		33.175.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2. 06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUM BER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				12 Dokumen	1.821.600,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.821.600,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	675.197.450,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		675.197.450,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	20.166.600,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	25.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				1 Unit	20.166.600,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah	-		25.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									a			berkeadilan dan berkelanjutan				
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.354.956.373,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	2.354.962.973,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	5.493.400,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		5.500.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	769.000.000,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		769.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUM BER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	1.580.462.973,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pening katan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.580.462.973,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	714.285.850,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pening katan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	714.285.850,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				19 Unit	264.806.000,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pening katan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		264.806.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUM BER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				10 Unit	239.687.100,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		239.687.100,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				71 Unit	51.027.500,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		51.027.500,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	158.765.250,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatkan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		158.765.250,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
2,	2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	-	-			-	163.408.125,00						-	165.000.000,00	

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUM BER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	-	-			-	163.408.125,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pening katan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	165.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro</i>				1 Dokumen Dokumen	49.900.000,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pening katan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		50.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
			<i>Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro</i>				30 Orang	113.508.125,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pening katan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		115.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
3,	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	-			-	3.466.296.959,00						-	3.491.301.958,00	

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUM BER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	2.959.036.159,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	2.984.041.158,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Kluster Kompetensi														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i>				380 Orang	2.530.911.159,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		2.530.911.158,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
			<i>Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n</i>				30 Lembaga	28.125.000,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		28.130.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja</i>				32 Unit	400.000.000,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		425.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-			-	263.172.400,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	263.172.400,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			<i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>				5 Lembaga	263.172.400,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		263.172.400,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-	-			-	13.327.100,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	13.327.100,00	DINAS KETENAGA KERJAAN

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUM BER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi														
			<i>Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi</i>				5 Perizinan	13.327.100,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pening katan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		13.327.100,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.03.2.04	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-			-	29.240.900,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pening katan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	29.240.900,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
			<i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i>				100 Perusaha an	29.240.900,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pening katan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		29.240.900,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	201.520.400,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pening katan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah	-	-	201.520.400,00	DINAS KETENAGA KERJAAN

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
												berkeadilan dan berkelanjutan				
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah</i>				280Dokumen	201.520.400,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		201.520.400,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
4,	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	-	-			-	2.427.155.970,00						-	2.321.981.150,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.418.248.764,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	1.385.981.150,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i>				6750 Orang	372.267.614,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing	-		340.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kel/Desa			perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan				
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			<i>Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja</i>				840 Orang	1.045.981.150,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		1.045.981.150,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	798.371.406,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	725.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			<i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>				5000 Orang	798.371.406,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		725.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	210.535.800,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	211.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.04.2.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)														
			<i>Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya</i>				270 Orang	210.535.800,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		211.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
5,	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	-			-	1.178.517.128,00						-	1.188.224.000,00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	199.554.000,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	205.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUM BER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASI ONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online</i>				130 Perusaha an	111.804.000,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		115.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan														
			<i>Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama</i>				25 Perusaha an	43.200.000,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		45.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan</i>				9 Laporan	44.550.000,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEND APATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		45.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	978.963.128,00			-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-	-	983.224.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>				95 Perkara	390.739.128,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		395.000.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>				95 Perkara	22.820.000,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		22.820.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.05.2.02.0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi														

**Rancangan Awal Rencana Kerja
Disnaker Tahun 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERINGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i>				12 Asosiasi dan Serikat Pekerja	41.892.000,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		41.892.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>				1 Lembaga	434.532.000,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		434.532.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			<i>Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i>				60 Orang	88.980.000,00	Kota Tangerang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Pemantapan pondasi dan daya saing perekonomian daerah berkeadilan dan berkelanjutan	-		88.980.000,00	DINAS KETENAGA KERJAAN
J U M L A H								26.215.049.078,00							20.486.697.109,00	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan peningkatan kualitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja guna mendukung pencapaian visi Kota Tangerang Tahun 2024-2026.

Untuk mencapai hal tersebut langkah-langkah yang diambil sebagai kaidah pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Seluruh pejabat struktural di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan program kerja tahun 2026 harus melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
3. Guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan Renja berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2026.

Rencana tindak lanjut dalam merespon dimasa yang akan datang melalui prioritas kegiatannya adalah :

1. Seluruh unsur di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2026 sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Kepala Dinas dibantu Sekretariat melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2026 guna memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan dengan baik.

Dengan adanya Renja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2026, maka penetapan prioritas pembangunan pada urusan ketenagakerjaan diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan perangkat daerah yang lain. Semoga dengan tersusunnya Renja Dinas Dinas

Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2026, mendorong peningkatan kualitas kinerja dapat perannya sebagai perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan. Selain itu, diharapkan Rencana Kerja tahun 2026 ini mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Tahun 2026 yang telah ditetapkan dan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024-2026.

Tangerang, Maret 2025

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN

UJANG HENDRA GUNAWAN, S.Sos, MM
NIP. 19720502 200212 1009